

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

2.1.1 Profil Desa

Pada jaman pemerintahan keraton Kartosuro mengalami huru-hara yang pada saat itu di pimpin oleh Eyang Suseno yang saat itu terlilit hutang dengan bangsa Cina dikarenakan Eyang Suseno yang mempunyai kebiasaan buruk mengisap candu, Eyang Suseno mempunyai saudara yang bernama Eyang Kalipo Kusumo. Karena di dalam Keraton situasi tidak nyaman bagi Eyang Kalipo Kusumo karena ulah saudaranya maka Eyang Kalipo Kusumo memutuskan untuk mengembara mencari tempat untuk menenangkan diri, Eyang Kalipo Kusumo pun berangkat disertai beberapa pengikutnya yaitu Hadi Ronggo, Hadi Mulyo dan Hadi Dumeling mereka melakukan perjalanan kewilayah timur dan beliau timbul hasrat untuk melakukan semedi di wilayah pegunungan dari sekian banyak gunung di wilayah timur Eyang Kalipo Kusumo tertarik dengan se bentuk gunung yang agak aneh yakni, bentuknya selalu sama jika dilihat dari sudut pandang berlainan.

Maka Berangkatlah Eyang Kalipo Kusumo beserta pengikutnya ke gunung tersebut, disuatu tempat Eyang Kalipo Kusumo beristirahat. Sesekali lagi beliau memandang gunung itu, namun kali ini dengan pandangan yang tajam (**mandeng**, bahasa jawa) dari peristiwa tersebut tempat beristirahat itu bernama **Ngindeng** (Ngingeti karo mandeng, bahasa Jawa) yang artinya melihat dengan pandangan tajam. Maka dikenal dengan nama Desa Ngindeng.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

Tabel 2.1

Riwayat Pemerintahan Desa

No	Nama Kepala Desa	Tahun	Keterangan
1.	Kromo Gati	-	
2.	Sero Kromo	-	
3.	Suro Dhiran	-	
4.	Genoto	1942-1984	
5.	Djemarin	1984-1986	
6.	Teguh Waluyo	1990-1998	
7.	Suwono	1998-2006, 2007- 2013	
8.	Katenan	2013-2019	

Dari table di atas yaitu para Kepala Desa Ngindeng yang pernah menjabat di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

2.1.2 Visi dan Misi

Visi : Kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun Desa Ngindeng yang lebih maju, mandiri, berkeadilan, dan religius serta masyarakat yang sejahtera.

Misi :

- 1) Bersama masyarakat meningkatkan dan memperkuat kelembagaan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik dan optimal
- 2) Bersama masyarakat dengan kegotong royongan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- 3) Mewujudkan Desa Ngindeng menjadi desa yang mandiri, berdayasaing tinggi dengan berbasis kebersamaan.

(Sumber : Data Desa Ngindeng 2019)

2.1.3. Geografis Objek Penelitian

a. Batas Dan Luas Wilayah Desa

Desa Ngindeng ini memiliki luas wilayah sebesar : 44.452 (Ha). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 2.2

Batas-batas Wilayah Desa Ngindeng

Batas Wilayah	Batas Desa
Sebelah Utara	Desa Bondrang
Sebelah Timur	Desa Temon
Sebelah Selatan	Kehutanan Perhutani
Sebelah Barat	Desa Kori

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

Gambar 2.1

Peta Desa Ngindeng



Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

b. Orbitas

Desa Ngindeng mempunyai berbagai ukuran jarak menuju Kepusat Pemerintahan dengan waktu tempuh yang berbeda-beda yaitu: Pertama jarak Desa Ngindeng ke Ibukota Kecamatan jarak yang ditempuh adalah 5 Km dengan waktu tempuh $\frac{1}{4}$ jam, Kedua jarak Desa Ngindeng ke Ibukota Kabupaten jarak yang ditempuh adalah 22 Km dengan waktu tempuh 1 jam, Ketiga jarak Desa Ngindeng ke Ibukota Provinsi jarak yang ditempuh adalah 230 Km dengan waktu tempuh 4 jam.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

c. Iklim dan Kesuburan Tanah

Iklim dan Kesuburan Tanah yang berada di Desa Ngindeng ini cukup berbeda-beda dengan suhu tertentu diantaranya: Dengan curah hujan 1000-1850 mm warna tanahnya menjadi hitam namun kalau suhunya rata-rata 27 derajat celcius tekstur tanahnya lempung dan tinggi tempatnya 215 dpl dengan kedalam 1 meter. Bintang wilayah Desa Ngindeng yaitu Dataran sedikit berbukit.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

d. Luas Tanah Menurut Penggunaannya

Luas tanah yang ada di Desa Ngindeng ini di pergunakan berbagai macam-macam diantaranya: Pertama digunakan untuk persawahan, tanah untuk persawahan ini dibagi menjadi dua macam yaitu untuk Kas atau Inventaris Desa seluas 14.000 Ha dan untuk Milik Rakyat seluas 145 Ha. Kedua, digunakan untuk Perkebunan atau Tegalan yaitu seluas 121 Ha. Ketiga digunakan lainnya yang dimaksud lainnya yaitu digunakan untuk TPU seluas 1.400 Ha untuk Bangunan Sekolah seluas 2.800 Ha untuk Jalan seluas 8,5 Ha dan untuk Lapangan Olahraga seluas 1.400 Ha. Keempat digunakan untuk Tanah Hutan Lindung seluas 126 Ha.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

2.2 Kondisi Demografi Obyek Penelitian

2.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin :

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Jumlah Penduduk | : 2.596 |
| 2. Laki-laki | : 1.277 |
| 3. Perempuan | : 1.319 |

Desa Ngindeng ini berpenduduk dengan jumlah 2.596 jiwa dibagi atas yang berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 1.277 jiwa dan yang berjenis kelamin Perempuan dengan jumlah 1.319 jiwa.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

2.2.2 Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan terakhir masyarakat Desa Ngindeng diantaranya yaitu, Masyarakat yang lulus pada Tingkat Pendidikan SD dengan jumlah 296 orang, Masyarakat yang lulus pada Tingkat Pendidikan SMP dengan jumlah 125 orang. Masyarakat yang lulus pada Tingkat Pendidikan SMA dengan jumlah 195 orang. Masyarakat yang lulus pada Tingkat Pendidikan DIPLOMA dengan jumlah 6 orang. Dan Masyarakat yang lulus dengan jumlah 10 orang.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

2.2.3 Keadaan Ekonomi

a. Bidang Pertanian

Tabel 2.3

Pertanian

No	Penggunaan	Luas (Ha)	Presentase Luas Wilayah
1.	Persawahan	14.145	31,28
2.	Perkebunan	121	0,27

Bidang pertanian yang ada di Desa Ngindeng terbagi dua penggunaan yaitu Persawahan dan Perkebunan.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

b. Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat

Tabel 2.4
Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat

No	Uraian		Jumlah	Keterangan
1.	Pedagang			
	1	Pedagang Sayuran	4	
	2	Pedagang Makanan	2	
	3	Warung	10	
	4	Pedagang Keliling	5	
	5	Toko	18	
2	Jasa			
	1	Usaha Pengergajian	1	
	2	Angkutan	6	
	3	Traktor	7	
	4	Heler Gabah / Selepan	2	

3	Industri			
	1	Kayu dan Meubeler	2	
	2	Pembuat Anyam-anyaman	1	
4	Pternakan			
	1	Bebek Petelur	3	
	2	Burung Puyuh	1	

Kegiatan usaha masyarakat Desa Ngindeng berbagai macam diantaranya: Pedagang, Jasa, Industri dan Pternakan. Dari usaha tersebut masih terbagi menjadi beberapa point antara lain : kagiatan usaha pedagang dibagi menjadi pedagang sayur, pedagang makanan, warung, pedagang keliling dan toko. Kemudian kegiatan usaha mengenai jasa terbagi menjadi beberapa point antara lain : usaha pengergajian, angkutan, traktor, heler gabah/selepan. Selanjutnya kegiatan usaha industri dibagi menjadi point antara lain : kayu dan meubeler, pembuat anyam-anyaman. Dan yang terakhir kegiatan usaha peternak yang terbagi menjadi beberapa point antara lain : bebek petelur, burung puyuh.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

2.2.4 Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah

Tabel 2.5
Pembagian Wilayah

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Ngindeng I	5	2
2.	Ngindeng II	4	2
3.	Krajan	7	3
4.	Bendo	6	3

Desa Ngindeng terbagi menjadi 4 Dusun dengan jumlah RT 22 dan RW dengan jumlah 10. Dengan rincian sebagai berikut: Dusun Ngindeng I terdapat RT yang berjumlah 5 dan RW yang berjumlah 2, Dusun Ngindeng II terdapat RT yang berjumlah 4 dan RW yang berjumlah 2, Dusun Krajan terdapat RT yang berjumlah 7 dan RW yang berjumlah 3, yang terakhir Dusun Bendo terdapat RT yang berjumlah 6 dan RW yang berjumlah 3.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

Potensi

Potensi yang dimiliki oleh Desa Ngindeng dalam mencapai visi dan misi yang akan dicapai diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Hasil Pembangunan Sebagai Modal Besar

Hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang telah dicapai oleh pemerintah desa selama ini dapat dijadikan modal dasar bagi tahapan pembangunan selanjutnya.

2. Adanya Potensi Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi lainnya

Potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya yang tersedia di Desa Ngindeng terutama disektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta dapat diupayakan sektor perikanan dan pariwisata dimana sektor-sektor tersebut sebagai usaha-usaha kegiatan ekonomi berbasis pedesaan yang dapat dijadikan modal dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Desa secara umum.

3. Ketersediaan Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja di Desa Ngindeng apabila diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan menjadi salah satu kekuatan pembangunan.

4. Masyarakat yang Dinamis

Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan, kritis dengan terus mengikuti perkembangan jaman serta dapat menempatkan Hak dan Kewajiban sesuai dengan porsinya.

5. Persatuan dan Kesatuan

Merupakan modal utama dalam setiap kegiatan baik fisik maupun non fisik hal tersebut dapat dilihat dari peran aktif seluruh kelembagaan yang ada di Desa serta tingginya nilai swadaya yang telah di abadikan oleh seluruh lapisan masyarakat maupun terhadap segala permasalahan yang ada baik antara masyarakat maupun terhadap berbagai agenda maupun program Desa.

6. Masyarakat yang Bertoleransi dan Bergotong royong

Kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan gemar gotong royong yang sudah terbangun di Desa Ngindeng merupakan suatu aset untuk membantu mensukseskan Program Desa.

7. Ketersediaan Lahan

Luasnya sektor pertanian dan perkebunan yang cukup luas yang apabila didalam pemanfaatanya dilakukan secara optimal, tepat guna serta ditunjang berbagai sarana dan prasarana pendukung diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat serta dapat digunakan untuk memajukan Desa.

8. Potensi Kelembagaan

Partisipasi aktif dari seluruh kelembagaan yang ada di desa yang mampu menjaga kekondusifan di Desa memupuk rasa kesetiakawanan, membangkitkan nilai-nilai swadayanya masyarakat serta membantu Pemerintah Desa baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Permasalahan Dalam Pembangunan Desa

Permasalahan dalam pembangunan desa menurut bidang urusan pemerintahan antara lain :

1. Pendidikan

- a. Masih ada siswa SD yang kurang bersemangat ke sekolah karena kelengkapan sekolahannya kurang memadai.
- b. Kurangnya guru pengajar pada TPA/TPQ.
- c. Belum adanya gedung untuk TPA/TPQ.
- d. Belum tersedianya perpustakaan desa atau taman baca.

2. Kesehatan

- a. Tidak adanya bidan desa yang menetap di desa.
- b. Belum adanya gedung posyandu, kegiatan posyandu dilakukan di rumah ketua wilayah/kamituwo.
- c. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
- d. Masih ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan dan USG dengan alasan ekonomi.
- e. Masih ada keluarga yang belum mempunyai MCK
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dan bersih.

3. Lingkungan Hidup

- a. Belum terintegrasi pengelolaan sumber daya alam.
- b. Belum adanya perdes tentang perlindungan satwa.

4. Pekerjaan Umum

- a. Belum dilakukannya perbaikan terhadap jembatan yang ada di desa.
- b. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan poros desa.
- c. Sistem drainase yang belum memadai dan tertata dengan baik.
- d. Perbaikan saluran irigasi.
- e. Perbaikan jalan usaha tani.

5. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.
- b. Masih rendahnya peran aktif generasi muda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang ada di desa.

6. Ketenaga Kerjaan

- a. Sulitnya mencari tenaga ketika musim tanam serempak.
- b. Kurangnya kegiatan pelatihan ketrampilan bagi usia kerja.

7. Ketahanan Pangan

- a. Belum optimalnya penanggulangan hama-hama tanaman.
- b. Tidak pastinya musim mengakibatkan salah pilih tanaman yang hendak ditanam.
- c. Anjloknya harga jual hasil pertanian saat musim panen tiba.

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Ketahanan keluarga dan pengembangan keluarga sejahtera belum optimal.

9. Perhubungan

- a. Masih terbatasnya jumlah lampu penerangan jalan.

10. Otonom Desa, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

- a. Rendahnya kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur Pemerintahan Desa.
- b. Sumber pendapatan desa masih rendah.
- c. Belum optimalnya STOK Pemerintahan Desa.
- d. Optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan komputerisasi.

11. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kapasitas SDM dan kelembagaan desa masih rendah.
- b. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan belum optimal, orientasi pada upah kerja.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat belum optimal.

12. Pertanian

- a. Rendahnya tata kelola kelompok ekonomi pertanian.
- b. Masih terdapat kelompok-kelompok pertanian yang tidak berjalan.
- c. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi yang bertujuan dan peningkatan ekonomi yang bertujuan agrobisnis.

d. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.

13. Perkebunan

- a. Pemanfaatan lahan kritis belum optimal.
- b. Tidak tersedianya bibit-bibit tanaman buah.
- c. Kurangnya modal.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019



a. STOK Pemerintahan Desa Ngindeng

Tabel 2.6

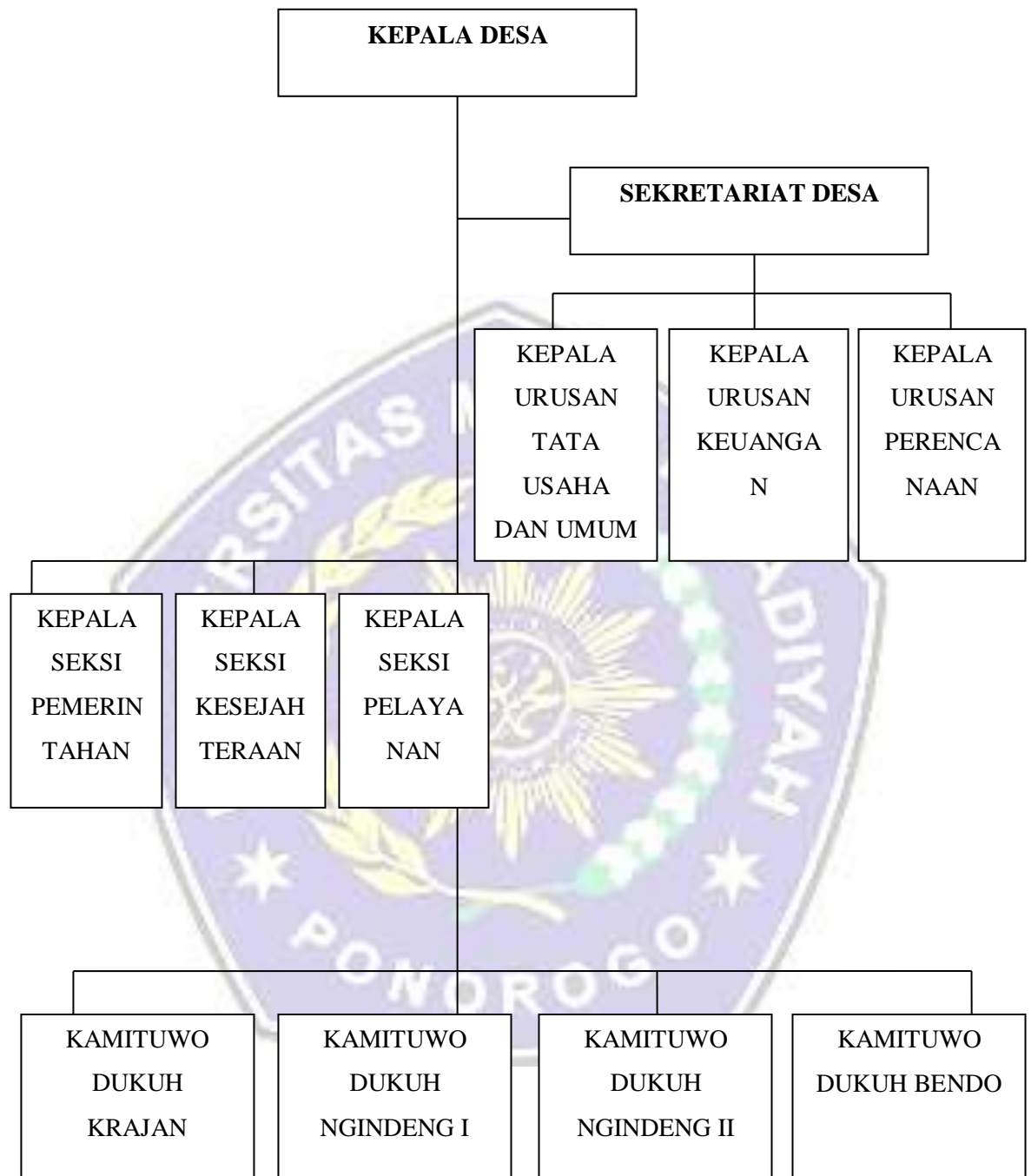
STOK Pemerintahan Desa Ngindeng

No	Struktur Organisasi	Keterangan
1.	Kepala Desa	Bima Sakti Putra S.Pd
2.	Sekretaris Desa	Joko Susilo
3.	Kamituwo Ngindeng I	Arif Setyo Subandi
4.	Kamituwo Ngindeng II	Muhadi
5.	Kamituwo Krajan	-
6.	Kamituwo Bendo	-
7.	Kepala Seksi Pemerintahan	Suwandi
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan	-
9.	Kepala Seksi Pelayanan	Untung
10.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Jeminto Purnomo
11.	Kepala Urusan Keuangan	Langgeng Budi Santoso
12.	Kepala Urusan Perencanaan	-

Tabel di atas tersebut menjelaskan mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa Ngindeng dari Kepala Desa hingga Kepala Urusan.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

b. Bagan STOK Pemerintahan Desa Ngindeng



Sumber : Data Desa Ngindeng 2019

2.3. Data Teknis Obyek Penelitian

Pelaksanaan pendirian BUMDes maka berdasarkan pasal 78 peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 87 ayat 1 dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes.

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengeluarkan Perda Nomor 15 Tahun 2015 menetapkan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian ditindak lanjuti Pemerintah Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo dengan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Maka didirikanlah BUMDes.

Desa Ngindeng mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri pada tanggal 18 bulan April tahun 2016 dengan proses pembentukan melalui musyawarah desa yang bernama BUMDes “Margo Mulyo”. Dalam pembentukan BUMDes ini ada kesepakatan antara BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat, kemudian kesepakatan ini dituangkan dalam peraturan Desa (Perdes) No. 7 Tahun 2016. Dalam Perdes No. 7 Tahun 2016 menjelaskan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “BUMDes”. Apabila sudah dituangkan dalam Perdes BUMDes secara resmi sudah berdiri legal hukumnya. Secara struktural BUMDes adalah salah suatu badan usaha yang dimiliki desa dan bertanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BUMDes “Margo Mulyo” ini membuka unit-unit usahanya diantara lain Foto Copy dan ATK, penyedia produk air mineral Amides, Agen BRI link, dan PPOB (Payment Point Online Bank) dan yang baru ini BUMDes “Margo Mulyo”

membuka unit usaha Persewaan atau Rentalan Tenda Camping. Fungsi dari masing-masing unit usaha tersebut adalah yang pertama unit usaha Foto Copy dan ATK berfungsi untuk membantu memudahkan masyarakat Desa Ngindeng dalam kebutuhan ingin memfoto copy dan membeli ATK supaya lebih dekat, yang kedua unit usaha air mineral Amides berfungsi untuk masyarakat Desa Ngindeng yang ingin membeli produk air mineral yang belum dijual di toko-toko yang ada di Desa atau yang ingin membeli produk air mineral ini BUMDes menyediakan, yang ketiga unit usaha Agen BRI link berfungsi untuk penyedia jasa layanan perbankan untuk masyarakat di Desa Ngindeng yang dimaksud adalah sistem pembayaran mengenai angsuran, tarik tunai, dan transfer, yang keempat unit usaha PPOB (Payment Point Online Bank) berfungsi untuk membantu masyarakat di Desa Ngindeng dalam membayar berbagai tagihan dalam satu tempat seperti tagihan listrik. Dan yang baru-baru ini BUMDes “Margo Mulyo” menambah usahanya yaitu dengan membuka usaha Persewaan atau Rentalan Tenda untuk Camping.

Perdes No. 7 Tahun 2016 Desa Ngindeng tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGINDENG

Dan

KEPALA DESA NGINDENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA

MILIK DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
3. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

BENTUK DAN TUJUAN BUMDes

Pasal 2

Bentuk BUMDes adalah

1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di setiap Desa maka dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa
2. Nama BUMDes sebagaimana yang dimaksud adalah dengan Nama **“MARGO MULYO”**

Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan :

1. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa

2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh
3. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa dan membuka lapangan kerja

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMDes

Pasal 4

Jenis Usaha BUMDes meliputi :

1. Jenis usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di Desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang
2. Menjalankan perdagangan umum terutama hasil produk-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunan
 - a. Perdagangan sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat
 - b. Perdagangan saprodi, pupuk, dan obat-obatan pertanian
 - c. Simpan pinjam dan perkreditan
3. Usaha Bersama (Holding) Pembentukan Desa Wisata

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

1. BUMDes Ngindeng bertempat di Desa Ngindeng
2. Berkedudukan di Desa Ngindeng.

BAB V
PERMODALAN DAN UNIT USAHA

Pasal 7

1. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa
2. Modal BUMDes terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa
3. Kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan Modal Desa
4. Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa
5. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada BUMDes yang disalurkan melalui APB Desa.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 19

1. Tahun anggaran BUMDes adalah 1 Januari dengan 31 Desember
2. Pembagian keuntungan antara unit usaha dan BUMDes akan diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 23

1. Pengelolaan secara transparan

2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan usaha BUMDes
3. Pengelolaan secara akseptabel (dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat

Sumber: Data Perdes BUMDes “Margo Mulyo” 2016

Visi dan Misi BUMDes “ Margo Mulyo”

Visi dan Misi BUMDes “Margo Mulyo” dijelaskan dalam Anggaran Dasar pada BAB II pasal 2 yaitu:

Visi: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngindeng melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan Motto **“Bersama Membangun Ekonomi Desa Untuk Kesejahteraan Bersama”**.

Misi :

1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
2. Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
3. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Mengelola dan program yang masuk ke desa bersifat dan bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

Tujuan dan Sifat BUMDes

Tujuan dan Sifat BUMDes dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga pada BAB II Pasal 2 yaitu:

Tujuan BUMDes adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
3. Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan
5. Membantu hasil produksi masyarakat desa dan mendapatkan harga yang memadai
6. Membantu peningkatan daya saing masyarakat

BUMDes bersifat:

1. Mencari keuntungan
2. Mendukung peningkatan usaha masyarakat
3. Membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Membantu memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa

Program Kerja BUMDes “Margo Mulyo” Sebagai Berikut:

1) Meningkatkan PADes

Dari keuntungan yang di peroleh BUMDes Margo Mulyo yang ada di Desa Ngindeng diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nantinya juga memajukan desa menjadi lebih baik.

2) Membantu Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat desa Ngindeng saat ini belum sepenuhnya tercukupi, BUMDes membantu pihak yang belum mampu dalam hal

kebutuhan sosial seperti batuan sembako, pembiayaan listrik mushola dan masjid satu desa, serta memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang belum mampu.

3) Membantu UMKM Budidaya yang diunggulkan desa

Keuntungan dari BUMDes tersebut juga dapat membantu UMKM masyarakat desa. Didesa Ngindeng UMKM yang dimiliki masyarakatnya seperti budidaya lele. Nantinya dapat membantu dalam hal penyuplaian pakan agar dapat memberikan keringanan untuk masyarakat yang akan mengembangkan UMKM.

Sumber: Data AD ART BUMDes “Magro Mulyo” 2016

Program kerja ini semuanya sudah berjalan tetapi presentase perkembangannya masih minim, kaitannya dengan PADes BUMDes “Margo Mulyo” ini sudah memberikan kontribusi dengan Desa dalam arti memberikan keuntungan kepada PADes, meningkatkan perekonomian seperti budidaya lele dengan pembayaran pakan secara tempo itu sudah membantu peningkatan perekonomian masyarakat tetapi presentasenya tadi yang masih minim.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pak Ribut Sekretaris BUMDes “Magro Mulyo”, 7 Juli 2020 jam 09.00.

Struktur Organisasi BUMDes “Margo Mulyo” terdiri :



1. Pelindung / Penasehat / Komensaris : Kepala Desa
2. Pengawas : Wardiyanto
Marji
Mujari
3. Ketua : Setiono
4. Sekretaris : Ribut, S.E
5. Bendahara : Didik Purwanto

Dalam perekrutan pengurus BUMDes “Margo Mulyo” ini awalnya ditunjuk langsung dari Kepala Desa dan dimusyawarahkan dalam bentuk musyawarah desa yang melibatkan BPD, Lembaga Desa serta Masyarakat Desa Ngindeng. Sehingga terbentuknya pengurus atau pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” dengan susunan struktur organisasi seperti di atas.

Pengelolaan BUMDes “Margo Mulyo ini juga mengacu kepada AD ART BUMDes untuk sebagai panduan dalam pengelolaan. Dalam AD ART BUMDes mengenai Nama, Waktu dan Kedudukan dijelaskan pada BAB I pasal 1 dan Struktur Organisasinya diatur dalam BAB XI pasal 17 kemudian mengenai pengelolaan usaha juga diatur dalam BAB XIV pasal 20 Dijelaskan secara rinci mengenai pengelolaan usahanya dan pada mengenai permodalan dijelaskan pada BAB XIII pasal 19.

**Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa
“Margo Mulyo” Desa Ngindeng Tahun 2016**

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “MARGO MULYO)

DESA NGINDENG KECAMATAN SAWOO

KABUPATEN PONOROGO

BAB 1

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUMDes adalah lembaga perekonomian di Desa yang dibentuk pada tanggal 18 bulan April tahun 2016 yang selanjutnya disebut BUMDes “MARGO MULYO” dengan periode waktu yang tidak terbatas
2. Lembaga BUMDes ini berkedudukan di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

BAB XI

Pasal 17

STRUKTUR ORGANISASI

1. Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
2. Susunan organisasi BUMDes terdiri dari :
 - a. Penasehat
 - b. Pelaksana Operasional
 - c. Pengawas
3. Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes ditetapkan oleh rapat umum dewan penasehat dan dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional
4. Dewan Penasehat sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa secara *ex officio*

BAB XIII

PERMODALAN

Pasal 19

Keuangan dan harta benda BUMDes diperoleh dari:

1. Kekayaan Desa atau bantuan kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDes
2. Bantuan dari APBD Kabupaten
3. Bantuan dari APBD Provinsi
4. Bantuan APBN
5. Tabungan Masyarakat
6. Pinjaman dan atau kerjasama dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan
7. Sisa hasil usaha

BAB XIV
PENGELOLAAN USAHA

Pasal 20

1. Pengelolaan usaha BUMDes dapat dilakukan oleh Pengelola atau Manager dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pelaksana melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
2. Pengangkatan seperti tersebut dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Rapat Pelaksana.

Sumber: Data AD ART BUMDes “Margo Mulyo” 2016

BUMDes “ Margo Mulyo ini juga sudah dimasukkan pada Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten / Kota yang Masuk Ke Desa dalam RPJMDes Ngindeng Tahun 2016 – 2022 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 25,000,000.00.

Sumber : Data Desa Ngindeng 2019